



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUB UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUDI NUGROHO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 224517

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/110 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 652.000.000

1. MOBIL, KIA PICANTO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 127.876.894**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	2.249.376.894
III. HUTANG	Rp.	465.415.759
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.783.961.135

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.